

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja keuangan dilihat dari variansi pendapatan dinilai kurang baik karena selalu menunjukkan angka yang negatif dan realisasi pendapatan memiliki presentase yang menurun dan selalu dibawah jumlah yang ditargetkan yang ditetapkan ini termasuk dalam kategori yang kurang menguntungkan.
2. Kinerja keuangan dilihat dari pertumbuhan pendapatan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang fluktuasi sehingga berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari data yang diperoleh bahwa fluktuasi PAD pada tahun 2019-2021 terjadi karena kurangnya penerimaan lain lain pendapatan sehingga dapat menyebabkan naik turunnya pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh covid-19.
3. Kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian daerah dengan nilai rata-rata 8,80% ini termasuk sangat kurang yang artinya rendahnya kemandirian daerah disebabkan oleh rendahnya kontribusi keuangan daerah terhadap pendapatan daerah.

4. Kinerja keuangan dilihat dari rasio ketergantungan daerah dengan rata-rata 78,11%, ini sudah memenuhi kriteria yaitu >50% yang berarti realisasi PAD sudah melewati target yang ditentukan.
5. Kinerja keuangan dilihat dari rasio efektifitas PAD dengan rata-rata 87,8%, ini tidak sesuai dengan kriteria karena masih dibawah 100% yang berarti realisasi PAD belum sesuai mencapai yang telah ditargetkan.
6. Kinerja keuangan dilihat dari rasio efektifitas pajak daerah dengan rata-rata 87,32% efektifitas pajak kurang baik karena masih dibawah 100% ini berarti belum mencapai yang ditargetkan.
7. Kinerja keuangan dilihat dari rasio efisiensi dengan rata-rata 4,99% berdasarkan rasio efisiensi masih dibawah dari >5% berarti sangat efisien, sedangkan rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Belu dari tahun 2019-2021 dibawah >5% sehingga dikatakan sangat efisien.

6.2 Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu

Pemerintah Kabupaten Belu diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Rasio kemandirian dan Rasio Efektifitas Pajak Daerah sehingga tingkat kemandirian dan pajak daerah di Kabupaten Belu menjadi lebih baik, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas berpotensi

SDM sehingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah sehingga penerimaan PAD dapat direalisasi dengan sebaik baiknya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan ada penambahan periode yang semakin panjang agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Belu. Memperluas ruang lingkup wilayah penelitian agar mampu membandingkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.
- Carunia Mulya Firdausy, 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Eka Heruwati, 2008. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobongan Dilihat Dari Pendapatan Daerah Terhadap APBD*
- H Umar. 2013. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Rajawali pers
- Jeiny Ribka Pandelaki, Daisy S. M Engka, Ita Pingkan Fasnier Rorong, 2021. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara : Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 22 No. 2021
- Laurens Derosario Berwulo, dkk. 2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UII Press
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* vol 5, Des 2010.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi 3. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Nafsi Hartoyo. (2017). *Optimalisasi PAD untuk peningkatan pendapatan daerah*. Balai Diklat Malang.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Wahyuningsih, 2016. *Pengaruh Pe*

ndapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal. Surakarta : Universitas Muhammadiyah

Wenny. 2011. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.